

PRAGMA-GRAMATIKAL KESANTUNAN HEGEMONIS BAHASA BALI DALAM *AWIG-AWIG*¹

Nengah Arnawa

nengah.arnawa65@gmail.com
IKIP PGRI BALI

I Wayan Gunartha

w.gunartha@yahoo.com
IKIP PGRI BALI

I Nyoman Sadwika

nsadwika@yahoo.co.id
IKIP PGRI BALI

Abstract: This study aims to reveal the relation between pragmatics and grammar, especially in Balinese language, which usually has been widely separated. The data were collected through document recording on a number of manuscripts and interviews with informants spreading out over five districts/cities in Bali Province as a representation of dialectal variation. Based on the theory of semantic structure it revealed that grammatical choice was motivated by pragmatic needs to realize Balinese hegemonic politeness in *awig-awig* of *pakraman* of the villages. The grammatical choices were: (1) personification of nouns *desa*, *banjar*, or *subak*, i.e. [+ CONCRETE] given the role as noun [+ HUMAN]. This grammatical choice is motivated by the adherence of members to the *adat* (custom) institutions. (2) Agents' dissipation to accentuate actions, especially those with negative images. This choice of syntactic structure is motivated by the maxim of wisdom and face-saving to reduce threats to someone.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan relasi pragmatik dengan gramatikal, khususnya dalam bahasa Bali, yang selama ini banyak dipisahkan

¹ *Awig-awig* merupakan aturan dasar dalam satu desa adat dengan landasan tri hita karena. *Awig-awig* berpijak pada budaya lokal Bali untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adat dan agama Hindu.

pengkajiannya. Data dikumpulkan melalui pencatatan dokumen terhadap sejumlah naskah dan wawancara dengan informan yang tersebar pada lima kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai representasi variasi dialektal. Dengan berpijak pada teori struktur semantik terungkap bahwa pilihan gramatikal dimotivasi oleh kebutuhan pragmatik untuk mewujudkan kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman*. Pilihan gramatikal itu adalah: (1) personifikasi nomina desa, *banjar*, atau *subak* yang [+KONKRET] diberi peran sebagai nomina [+INSAN]. Pilihan gramatikal ini dimotivasi oleh ketaatan warga terhadap lembaga adat tersebut. (2) Pelepasan agen untuk menonjolkan tindakan, khususnya yang bercitra negatif. Pilihan struktur sintaksis ini dimotivasi penerapan maksim kebijaksanaan dan penyelamatan muka untuk mengurangi ancaman pada seseorang.

Kata Kunci: pragma-gramatikal; kesantunan hegemonis; awig-awig; struktur semantik

PENDAHULUAN

Selain desa dinas, di Provinsi Bali terdapat 1.488 desa *pakraman* ‘desa adat’ yang memiliki tugas pokok pembinaan adat dan budaya berlandaskan falsafah *tri hita karana*, yang mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Desa *pakraman* merupakan kesatuan wilayah dan budaya dalam bingkai tradisi Hindu dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Surpha, 2006:17). Untuk menjamin keberlangsungan tatakelola, setiap desa *pakraman* berpedoman pada *awig-awig* ‘undang-undang desa’ yang dirumuskannya. Setiap *awig-awig* wajib disusun dengan menggunakan bahasa Bali (Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 1992).

Dilihat dari bentuknya, *awig-awig* merupakan wacana tulis monolog (Djajasudarma, 2006:6). Wacana monolog umumnya mengutamakan keutuhan informasi. Sebagai aturan pokok pada suatu desa *pakraman*, *awig-awig* disusun untuk ditaati oleh setiap warganya. Secara sosial, hubungan vertikal ini menyebabkan dominasi lembaga desa *pakraman*. Pemertahanan dominasi tersebut membutuhkan kepatuhan dari setiap warganya melalui persetujuan (Thomas & Wareing, 2007:53). Dalam konteks wacana kekuasaan kolektif ini dibutuhkan strategi linguistik melalui penggunaan ragam bahasa Bali yang dipersepsi lebih santun. Interelasi ini dipolakan sebagai kesantunan hegemonis dalam bahasa Bali sehingga ketaatan warga terhadap *awig-awig* bukan karena ketakutan akan berbagai konsekuensi (sanksi) tetapi karena pemahaman tujuan bersama (Patria & Arief, 2015:125). Deskripsi dan eksplanasi pola-pola linguistik dalam *awig-awig* diharapkan dapat memberi kontribusi kajian pragmatik dan gramatikal yang selama ini cenderung dipisahkan.

Kajian aspek pragma-gramatikal mengacu kepada pandangan Owens (1992:15) bahwa bahasa terdiri dari tiga komponen, yakni bentuk (gramatikal), isi (semantik), dan penggunaan (pragmatik). Secara konseptual, pandangan ini menyatakan bahwa kajian terhadap penggunaan bahasa akan menjadi parsial apabila hanya ditinjau dari salah satu aspek saja. *Awig-awig* merupakan salah satu wujud nyata penggunaan bahasa Bali sehingga setiap konstruksi kalimat dalam *awig-awig* tidak terpisahkan dengan konteks penggunaan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penjelasan terhadap konstruksi kalimat dalam *awig-awig* perlu mempertimbangkan aspek fungsional, yang banyak dikaji dalam pragmatik (Leech, 1993: 70). Kajian pragma-gramatikal akan menelaah data (korpus) dari dua sisi, yakni aspek bentuk dan pemetaannya pada konteks penggunaan. Pendekatan pragma-gramatikal bertujuan menjelaskan konstruksi sintaksis sebagai presentasi kesantunan

hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig*. Kajian ini diharapkan dapat mengungkapkan pemarkah dan pola linguistik yang digunakan untuk membentuk dan memelihara harmoni sosial (Piller, 2016:28).

Kesantunan berbahasa merupakan norma sosial sebagai acuan standar yang disepakati. Kesantunan berbahasa merupakan refleksi sikap toleran yang harus dipahami untuk membangun dan memelihara hubungan baik (Huang, 2008:97). Kesantunan berbahasa merupakan prinsip retorika yang memanfaatkan ekspresi linguistik dalam hubungan sosial untuk menunjukkan penghargaan terhadap partisipan (Grundy, 2000:145). Penerapan prinsip tersebut melatarbelakangi pemolaan klausa sebagai wujud perilaku linguistik. Oleh karena itu, analisis setiap pola klausa dan/atau kalimat dalam teks *awig-awig* penting mempertimbangkan variabel-variabel yang memunculkannya dalam konteks kewacanaan yang lebih luas. Hubungan pola gramatikal dan konteks merupakan fokus studi pragma-gramatikal.

Kesantunan dipandang sebagai relasi daya dengan makna yang diukur dengan skala untung – rugi yang tergantung pada konteks (Leech, 1993:166). Artinya, sebuah konstruksi sintaksis bisa saja menguntungkan dalam suatu konteks, tetapi merugikan pada konteks yang lain; seperti data berikut ini.

- (1) Pradé wénten krama sané mamaling barang sinanggeh suci, tur sampun prasida kapastika wenang dinanda, tur patut ngwaliang barang sinanggeh suci punika rauhing prabéa pangupakara prayascita manut dresta (Awig-awig Desa Pakraman Penarukan, P 39:2.)

‘Jika ada warga yang mencuri benda suci, dan sudah dapat dipastikan harus didenda dan wajib mengembalikan benda suci itu serta biaya penyuciannya sesuai tradisi’

Data (1) di atas menggunakan modus pengandaian. Secara semantik, data (1) dapat dikonstruksi dengan menggunakan modus pernyataan melalui pelepasan keterangan syarat dan unsur aspek sehingga menjadi, seperti berikut ini.

- (1a) Krama sané mamaling barang sinanggeh suci wenang dinanda tur patut ngwaliang barang sinanggeh suci punika rauhing prabéa pangupakara prayascita manut dresta.

‘Warga yang mencuri benda suci harus didenda, dan wajib mengembalikan benda suci itu serta biaya penyuciannya sesuai tradisi’

Kalimat (1) dan (1a) mempresentasikan makna yang sama. Unsur subjek kalimat (1a) lebih eksplisit sehingga menjadi lebih efektif daripada kalimat (1). Kekaburan fungsi subjek pada kalimat (1) justru disebabkan oleh pengedepanan keterangan syarat *pradé wénten* ‘jika ada’. Akan tetapi secara sosio-psikologis, oleh para informan dikatakan bahwa pola kalimat (1) dipersepsi lebih santun daripada pola kalimat (1a). Kalimat (1) diyakini lebih memiliki daya daripada kalimat (1a). Inilah fakta penggunaan bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman* bahwa aspek pragmatik berelasi dengan aspek gramatikal. Pilihan gramatikal sangat tergantung pada urgensi pragmatiknya. Dalam konteks ini, keterangan syarat bukan merupakan kebutuhan yang diharuskan oleh kaidah sintaksis dan semantik tetapi sebagai strategi kesantunan hegemonis untuk memunculkan daya pragmatiknya (Arnawa, 2016:43).

Kesantunan berbahasa terkait erat dengan kearifan lokal yang bersumber dari nilai sosial budaya dan keyakinan masyarakat bahasa tertentu (Sumarsono, 2010:143). Setakat dengan ini, Olaniyi (2017:59) mengatakan bahwa terdapat kaitan erat antara budaya dan komunikasi. Budaya berpengaruh pada keberterimaan dan kesesuaian pilihan ujaran. Jie dan Feife (2016:38) menegaskan bahwa dimensi sosial dan budaya dapat memfasilitasi prinsip kesantunan untuk mencapai peroluksi komunikasi yang diharapkan. Kesantunan selalu

dipertimbangkan untuk menentukan pilihan konstruksi linguistik dalam setiap komunikasi (Wang, 2009:286). Kesantunan berbahasa tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan perspektif tindak ujar yang melibatkan konsep implikatur dan prinsip kerja sama (Nababan, 1987:33). Hal ini pun ditegaskan Liu (2017:563) bahwa prinsip kerja sama dan kesantunan sangatlah penting dalam tindak bahasa. Sebagai teori penggunaan bahasa, implikatur mempertimbangkan pilihan struktur gramatikal bahasa sebagai kaidah yang bersifat sistemik. Hubungan gramatikal dengan fungsi komunikasi berujung pada penyatuan teori linguistik dan pemetaanya untuk fungsi-fungsi komunikatif tertentu. Hubungan ini melahirkan pendekatan hibrida yang disebut pragma-gramatikal. Deskripsi sintaksis dan leksikal merujuk pada kebermaknaan dalam implikatur percakapan (Levinson, 1989:162). Sejalan dengan konsep ini, Bach & Harnish (1979:85) mengatakan bahwa analisis linguistik sangatlah esensi untuk menjelaskan lokusi ujaran.

Mengacu pandangan para pakar di atas, secara spesifik, penelitian ini bertujuan mengungkapkan peran struktur semantik leksikal dan pola sintaksis bahasa Bali untuk mewujudkan kesantunan hegemonis dalam *awig-awig*. Kesantunan berbahasa dilihat dari perspektif penutur dan orang lain yang dipresentasikan melalui pilihan klausa atau kalimat. Sebagai sebuah perspektif, kesantunan berbahasa sangat terkait dengan parameter pragmatik, yang meliputi tingkat jarak sosial, tingkat status sosial, dan tingkat peringkat tindak ujar. Parameter pragmatik ini menghasilkan empat gradasi kesantunan yang berbeda, yakni: (1) kurang santun, (2) agak santun, (3) lebih santun, dan (4) paling santun (Wijana, 1996:65). Konsep teoretis ini sangat relevan dengan eksistensi bahasa Bali yang memiliki *angguh-ungguhing basa* ‘tingkatan bahasa’ dan dialek geografis yang beragam. Secara umum penggunaan bahasa Bali ragam halus dinilai sebagai wujud penghormatan terhadap petutur sehingga dipersepsi lebih santun daripada penggunaan ragam madya dan rendah. Realitas budaya bahasa ini akan dibuktikan dalam *awig-awig desa pakraman*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang berupaya menjelaskan fenomena ragam bahasa Bali dalam *awig-awig desa pakraman*. Untuk mewujudkan tujuan itu dilakukan *in-depth analysis* (Sumanto, 1995). Pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan dokumen dan wawancara. Sumber data ditetapkan secara *non random sampling*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *areal sampling* (Marzuki, 1986:50) dengan mempertimbangkan variasi dialektal bahasa Bali. Dari 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, diambil 5 kabupaten/kota sebagai sampel penelitian, yakni Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, dan Kabupaten Jembrana. Dari semua lokasi penelitian itu terpilih 17 dokumen *awig-awig* sebagai sumber data. Data yang diperoleh melalui pencatatan dokumen ditriangulasi dengan wawancara melalui teknik sadap dan catat (Mashun, 2005:116). Informan ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria: memahami *awig-awig*, adat, budaya, serta terampil berbahasa Bali. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 34 orang yang merupakan perwakilan dari 17 Desa pakraman. Data yang terkumpul diklasifikasi untuk mendapatkan kategori korpus inti yang dijadikan pijakan analisis. Korpus inti dianalisis dengan metode padan ekstralingual, dengan teknik dasar hubung banding ekstralingual (Mashun, 2005:120). Secara operasional, teks *awig-awig* dipilah menjadi unit satuan berupa klausa atau kalimat. Setiap unit data dilakukan hubung banding menyamakan dan hubung banding membedakan dengan faktor penentu pemakai dan

pemakaian bahasa. Dengan teknik ini kesantunan hegemonis bahasa Bali pada *awig-awig* dapat dikarakterisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data terungkap dua hal pokok, yakni (1) struktur semantik leksikal, dan (2) pola sintaksis dijadikan instrumen penting untuk mewujudkan kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman*.

Struktur Semantik Leksikal dan Kesantunan Hegemonis

Setiap kata memiliki konfigurasi komponen makna. Konfigurasi komponen makna merupakan struktur semantik yang menentukan kebutuhan gramatikal sintaksis kata itu. Kalimat atau klausa yang mengingkari struktur semantik leksikal menyebabkan klausa atau kalimat itu tidak gramatikal. Pembatasan-pembatasan gramatikal sesungguhnya dapat ditelusuri melalui analisis struktur semantik leksikal (Arnawa, 2016:46). Namun demikian, untuk mencapai daya pragmatik, penyesuaian struktur semantik leksikal banyak digunakan dalam teks *awig-awig* desa *pakraman*, seperti data berikut ini.

1. *Désa* miwah banjaré mapawéh leluputan ayah utawi pakenan-kenan ring sang inggiling linggih utawi sané kawelas asihin (*Awig-awig Desa Pakraman Sumerta*, p 32.1).

‘Desa dan banjar² memberi pembebasan kewajiban atau urunan kepada para pemimpin atau yang dikasihani’.

2. Banjaré wenang ngardi awig-awig ngamanggehang tata carané nyangra pakaryan kramané munggah ring ajeng (*Awig-awig Desa Pakraman Sumerta*, p 71.2).

‘Banjar berhak menyusun peraturan (untuk) mengukuhkan tatacara melaksanakan kegiatan warga seperti tersebut di atas’

3. Banjar utawi désa wenang niwakang pamidanda ring wong désané sané sisip (*Awig-awig Desa Pakraman Sumerta*, p 78.1).

‘Banjar atau desa berhak memberi sanksi kepada warga desa ini yang bersalah’

4. Wicara ring désa pakraman, yogya kapidanda antuk désa. Dadandan mantuk ka désa (*Awig-awig Desa Pakraman Menaga*, p 51.1.ha).

‘Pelanggaran di desa adat, wajib didenda oleh desa. Dendanya masuk ke desa’

5. Banjar pakraman, pamaksan, subak³, sekaa-sekaa sané wénten sajeroning Désa Pakraman Menaga wenang ngawangun awig-awig, perarem sowang-sowang, nanging daging ipun tan yogya tungkas ring awig-awig Désa Pakraman Menaga (*Awig-awig Desa Pakraman Menaga*, p 53.3).

‘Banjar adat, paguyuban, subak, organisasi-organisasi yang ada di lingkungan Desa Adat Menaga berhak membuat peraturan, kesepakatan masing-masing, tetapi isinya tidak boleh bertentangan dengan awig-awig Desa adat Menaga’

Data (2 – 6) di atas memberi gambaran korpus kalimat bahasa Bali dalam *awig-awig* desa *pakraman*. Pengungkapan fenomena kesantunan hegemonis data (2 – 6) tersebut

² *Banjar* istilah adat untuk menyebut bagian dari desa adat. Jika dianalogikan dengan desa dinas, *banjar* identik dengan dusun/lingkungan.

³ Subak merupakan organisasi irigasi pertanian yang berbasis Hindu di Bali.

dilandasi teori struktur semantik, yang berpijak pada nomina dan verba (Chafe, 1972:134). Telaah struktur semantik berpijak pada analisis komponensial untuk mengungkap fitur semantik nomina dan verba yang akan menentukan kegramatikalitas suatu kalimat. Relasi nomina dengan verba menggambarkan peran semantik argumen pada sebuah klausa/ kalimat. Givon (1984 : 56) menjelaskan bahwa struktur semantik nomina relatif stabil yang digambarkan dengan hierarki [ENTITAS > TEMPORAL >KONKRET >BERNYAWA > INSAN, yang artinya jika suatu nomina yang memiliki fitur paling kanan, yakni [+INSAN] pasti memiliki semua fitur di sebelah kiri; sebaliknya jika hanya memiliki fitur paling kiri, yakni [+ENTITAS] pasti nomina itu tidak memiliki semua fitur di sebelah kanannya.

Dalam kajian sintaksis, verba menjadi kepusatan semantik untuk menentukan argumen suatu kalimat. Berdasarkan fitur semantik DINAMIS, PERFEKTIF, dan FUNGTUAL, verba dibedakan menjadi tindakan, proses, dan keadaan, yang dapat ditabulasi pada tabel 1.

Tabel 1. Tipe dan Fitur Semantik Verba

Fitur Tipe	DINAMIS	PERFEKTIF	PUNGTUAL
Tindakan	+	+	+
Proses	+	-	-
Keadaan	-	-	-

Berpijak pada teori struktur semantik tersebut, aspek gramatikal data (2 – 6) dapat dijelaskan berikut ini.

Data (2 – 4, dan 6) merupakan kalimat aktif dengan subjek berperan sebagai agen. Data (2) merupakan kalimat majemuk rapatan sama predikat. Inti struktur semantik data (2) terletak pada nomina *desa* dan *banjar* serta verba *mapawéh* ‘memberi’. Nomina *desa* dan *banjar* memiliki fitur semantik [+KONKRET]. Dengan fitur semantik tersebut, nomina *desa* dan *banjar* tidak mungkin sebagai agen untuk melakukan verba tindakan *mapawéh*, yang mewajibkan argumennya berfitur [+INSAN]. Hal yang sama pun terjadi pada data (3), (4), dan (6) karena semua peran semantik agen pada ketiga data ini diderivasi dari nomina *banjar* dan *desa* yang berfitur semantik [-INSAN]. Sedangkan struktur verba *ngardi* ‘membuat’ (data 3), *niwakang* ‘menghukum’ (data 4), dan *ngawangun* ‘menyusun’ (data 6) membutuhkan argumen dengan fitur semantik [+INSAN]. Penyimpangan struktur semantik yang terjadi pada data tersebut dimotivasi oleh faktor pragmatis. Penutur asli bahasa Bali memilih konstruksi kalimat seperti data (2 – 4), dan (6) untuk mencapai daya pragmatik. Dikatakan demikian karena dalam budaya Bali ketaatan warga terhadap lembaga adat sangatlah tinggi. Kearifan lokal ini diimplementasikan dalam penyusunan *awig-awig* sehingga konstruksi-konstruksi kalimat yang digunakan diharapkan dapat mewujudkan daya pragmatik kesantunan hegemonis. Atas pertimbangan pragmatis tersebut, *desa* dan *banjar* diberi peran semantik sebagai agen, meskipun menyimpang dari struktur semantik nomina dan verba.

Penggunaan nomina *banjar* dan *desa* yang berfitur semantik [-INSAN] untuk melakukan verba tindakan *mapawéh* ‘memberi’, *ngardi* ‘membuat’, *niwakang* ‘menghukum’, dan

ngawangun ‘menyusun’ merupakan upaya personifikasi karena pada kenyataannya yang melakukan verba tindakan tersebut adalah nomina [+INSAN] seperti *klian desa* ‘ketua desa adat’, *klian banjar* ‘kepala banjar adat’ *prajuru* ‘pengurus’, dan/atau *krama* ‘warga’, sehingga agen pada data (2 – 4) dan (6) dapat diganti dengan salah satu nomina berpitur semantik [+INSAN] tersebut. Data (2), misalnya, dapat saja dikonstruksi menjadi berikut ini, tanpa mengubah pengertiannya.

(2a) *Kelian désa* miwah *kelian banjaré* mapawéh leluputan ayah utawi pakenan-kenan ring sang inggiling linggih utawi sané kawelas asihin (*Awig-awig Desa Pakraman Sumerta*, p 32.1).

‘Kepala desa adat dan *kelian banjar adat* memberi pembebasan kewajiban atau urunan kepada para pemimpin atau yang dikasihani’.

Namun demikian, konstruksi kalimat (2a) tidak menjadi pilihan karena ingin memanfaatkan kearifan lokal akan ketaatan warga pada lembaga adat sehingga kesantunan hegemonis dapat terwujud. Kecuali ketaatan warga pada lembaga adat, dalam budaya tutur masyarakat Bali, ujaran tidak langsung maupun tidak literal dinilai lebih sopan daripada tuturan langsung maupun literal. Menacu pada (Wijana, 1996: 32), data (2) termasuk pada tuturan tidak literal. Oleh karena itu, mempersonifikasikan lembaga adat seperti desa dan *banjar* dapat mewujudkan kedua kearifan lokal tersebut.

Data (5) terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama pada data ini menggunakan konstruksi pasif, melalui memetakan fungsi objek dengan peran semantik agen. Verba data (5) kalimat pertama adalah *kapidanda* ‘didenda’ dengan slot objek pelaku yang diisi dengan nomina *desa* yang berfitur semantik [-INSAN]. Terhadap data ini, analisis yang sama seperti data (2 – 4) dan (6) dapat diterapkan. Perbedaananya hanya pemetaan agen terletak pada fungsi objek. Konstruksi data (5) semakin memperkuat simpulan bahwa dalam penyusunan *awig-awig*, kesantunan hegemonis dapat diwujudkan dengan memanfaatkan kepatuhan warga terhadap lembaga adat serta nilai etika, bahwa tuturan tidak langsung dan atau tidak literal dipersepsi lebih santun oleh penutur bahasa Bali. Kecuali itu, penggunaan ragam bahasa Bali *alus singgih* ‘ragam hormat tinggi’ pun mendorong kesantunan hegemonis karena ragam ini merupakan wujud penghormatan terhadap partisipan.

Pola Sintaksis dan Kesantunan Hegemonis

Strategi lain yang digunakan untuk mewujudkan kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awi-awig* adalah pola sintaksis elipsis, terutama pada topik tutur tentang kewajiban *krama* ‘warga’. Kewajiban *krama* merupakan tanggung jawab, yang oleh sebagian warga sering dirasakan sebagai ‘beban’ sehingga pengungkapannya membutuhkan strategi linguistik untuk mencapai efek kesantunan hegemonis. Berikut ini disajikan data penggunaan pola elipsis untuk mencapai efek pragmatik tersebut.

1. Pradé palas riwekasan kacihnian adung malih, patut: (a) nglaksanaang upacara pawiwahan malih; (b) kadanda nikel saking palasé (*Awig-awig Desa Pakraman Batusari*, p 55).
‘Jika setelah bercerai keesokan hari rujuk kembali, wajib: (a) melaksanakan upacara pernikahan kembali; (b) didenda dua kali lipat sejak perceraian’
2. Pradé wusan nandur, sudurung tugtug panamaya tan wenang: (a) ngangon bébék, ayam, utawi ubuh-ubuhan suku pat ring sajeroning carik; (b) ngrereh pici-pici lan jejukutan séwos ring saiha carik; (c) ngrereh lindung ngruawak punden wiadin nyuluh; (d) nuba ulam (*Awig-awig Subak Ketug-Ketug*, p 30).

- ‘Jika setelah menanam, sebelum cukup waktunya dilarang: (a) mengembala itik, ayam, atau ternak berkaki empat di sawah; (b) mencari siput dan sayur-sayuran lain di sawah; (c) mencari belut membongkar pematang dan nyuluh⁴; (d) meracuni ikan’.
3. Rikala nglaksanayang pasamuhan/paruman/pasangkepan, nénten prasida rauh, patut kadanda: (ha) nénten pisadok, keni danda Rp 5.000,00; (na) nglepika, keni danda Rp 10.000,00 (Awig-awig Banjar Pakraman Balér Balé Agung, p 19.1)
 ‘Manakala melaksanakan rapat, tidak bisa hadir wajib didenda: (a) nenten pisadok, kena denda Rp 5.000,00; (b) membangkang, kena denda Rp 10.000,00’.

Data (7 – 9) disusun menggunakan pola elipsis. Dalam telaah wacana pragmatik, bagian yang dilesapkan adalah informasi yang sudah diketahui pelibat (Lubis, 1993). Untuk mengetahui informasi yang lesap dapat menerapkan penafsiran lokal (Djajasudarma, 2006:45). Pada data (7 – 9) fungsi sintaksis yang dilesapkan adalah subjek, yang secara sintaksis fungsi itu sangat dibutuhkan karena predikatnya diisi dengan verba tindakan. Melalui penafsiran lokal dapat diketahui bahwa subjek data (7 – 9) adalah *krama* ‘warga’. Dilihat dari aspek kewacaan kalimat pada data (7 – 9) dapat mempertahankan koheisi dan koherensinya. Namun demikian, hal lain yang perlu diungkap dari penerapan pola elipsis ini adalah pesan budaya yang ada di balik pola sintaksis tersebut.

Desa dan *banjar pakraman* merupakan lembaga adat yang berbasis *panyamabrayaan* ‘persaudaraan’ yang berpedoman pada falsafah *sagilik saguluk salunglung sabayantaka* ‘bersatu padu menyusun kekuatan untuk menghadapi bahaya’; *paras-paros sarpanaya* ‘memutuskan sesuatu secara musyawarah mufakat’; dan *saling asah, saling asih, saling asuh* ‘saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling membantu’. Falsafah ini berhasil membangun ikatan sosial yang kuat di dalam *pakraman* sehingga desa dan banjar berciri kehidupan yang kolestial. Kekuatan sosial ini juga dilandasi ajaran etika, yang merupakan salah satu unsur kerangka agama Hindu, yakni *tat twam asi* yang bermakna ‘aku adalah kamu dan kamu adalah dia’ yang menyiratkan makna bahwa kita semua sama. Dalam cakupan yang lebih luas ajaran etika diperkuat oleh upanisad *Brahman atman aikyam* yang bermakna semua roh (jiwa) berasal dari Tuhan. Semua pedoman filosofis tersebut menjadikan desa dan *banjar pakraman* sebagai lembaga yang komunal, bersifat kolektif dan kolestial.

Implementasi budaya komunal yang bersifat kolektif dan kolestial sering dipresentasikan melalui pelesapan agen dalam struktur kalimat dalam *awig-awig*. Data (7 – 9) di atas merupakan petunjuk lingual bahwa elipsis agen bukan semata-mata pertimbangan aspek linguistik, tetapi mengandung motivasi budaya. Analisis lain yang bisa diberikan atas penggunaan pola elipsis itu adalah penonjolan tindakan yang dipresentasikan dengan verba tindakan dalam bahasa Bali. Hal ini sangat sejalan dengan teori struktur semantik bahwa kepusatan semantik kalimat terletak pada verbanya. Dikaitkan dengan prinsip kesantunan bahwa penggunaan tuturan impositif dapat memperbesar keuntungan pada orang lain; serta teori penyelamatan muka untuk mengurangi ancaman pada seseorang. Dengan mengelipsiskan agen seperti data (7 – 9) tuturan dipersepsi lebih santun karena dapat menyelamatkan muka orang lain dan dinilai lebih bijaksana (*tact maxim*). Jadi, pelesapan agen pada kalimat untuk menyatakan tindakan pelanggaran atau citra negatif lainnya,

⁴ *Nyuluh* adalah kegiatan mencari ikan, belut, kodok, siput, dan lain-lain pada malam hari dengan menggunakan lampu penerang

merupakan strategi membangun kesantunan hegemonis bahasa Bali dalam *awig-awig*. Sebaliknya tidak akan terjadi pelepasan agen apabila kalimat itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang bercitra positif, seperti data berikut ini.

4. Sadurungé ngranjing ring pakubon, sang lanang patut ngawéntenang pabyakala (Awig-awig Desa Pakraman Alapsari, p 49.c)
‘Sebelum masuk ke rumah, pengantin pria wajib menyenggarakan upacara pembersihan diri’
5. Sang sapa sira hugi krama désa myara watek suku kalih, watek makampid, yatnain ugi mangda ten banget ngarucakin ngaletihin palemahan, pomahan, tatanduran druén anak sios (Awig-awig Desa Pakraman Menaga, p 29.3).
‘Siapa pun warga desa yang memelihara hewan berkaki dua, hewan bersayap, awasi benar agar tidak sangat mengganggu, mengotori pekarangan, perumahan, tatanaman milik orang lain’
6. Krama utawi banjar dados nyarad banjar tiosan risampun polih panugrahan saking prajuru désa (Awig-awig Desa Pakraman Rendang, p 35.5).
Warga atau banjar boleh membantu banjar lain setelah mendapat izin dari pengurus desa’.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan konstruksi gramatikal bahasa Bali dalam *awig-awig* bukan semata-mata merupakan tuntutan linguistik, tetapi dimotivasi oleh pragmatik. Struktur semantik dan pola sintaksis dapat dioptimalkan untuk membentuk kalimat bahasa Bali yang santun dan hegemonis dalam *awig-awig* desa *pakraman*. Berdasarkan fakta linguistik seperti yang telah diuraikan di atas, terungkap bahwa terdapat relasi gramatikal dengan penggunaan bahasa (pragmatik). Oleh karena itu, melalui penelitian ini disarankan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sehingga peran motivasi pragmatik untuk menentukan pilihan gramatikal semakin terbukti.

DAFTAR RUJUKAN

- Arnawa, N. 2016. Struktur Semantik dan Pembatasan Gramatikal: Studi Kasus pada Kalimat Bahasa Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya IV*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hal 43 – 52.
- Arnawa, N., I W. Gunartha, I N. Sadwika. 2017. The use of modality markers to perform hegemony politeness in using Balinese language: a case study on *Awig-awig*. *JASL-Journal of Applied Studies in Language: Vol.1 No.1 December 2017*, hal. 43 – 51.
- Bach, Kent & Robert M. Harnish. 1979. *Linguistic Communication and Speech Acts*. Cambridge: The Mit Press.
- Chafe, W.L. 1972. *Meaning and The Structure of Language*. Chicago : The University of Chicago Press. Hal 134-161
- Djajasudarma, T. F. 2006. *Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Grundy, P. 2000. *Doing Pragmatics*. New York: Oxford University Press.
- Givon, T. 1984. *Syntax: A Functional-Typological Introduction*. Philadelphia: John Benjamins.

- Huang, Yongliang. 2008. Politeness Principle in Cross-Culture Communication. *English Language Teaching* 1 (1), hal. 96 – 101.
- Jie, Wang & Wei Feife. 2016. The Application of Politeness Principle in the Analysis of Drama: Take Taechouse as an Example. *Cross-Cultural Communication* 12.(5), hal. 35 – 38.
- Leech.G. 1993. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Diterjemahkan oleh M.D.D. Oka. Jakarta: UI Press.
- Levinson, S.C. 1989. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Liu, Lulu. 2017. Application of Cooperative Principle and Politeness Principle in Class Question-answer Process. *Theory and Practice in Language Studies*, 7(7), hal. 563-569.
- Lubis, A.H.H. 1993. *Analisis Wacana Pragmatik*. Badung: Angkasa.
- Marzuki. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE – UII.
- Mashun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, P2LPTK.
- Olaniyi, Kaseem. 2017. Politeness Principle and Ilorin Greetings in Nigeria: A Sociolinguistic Study. *International Journal of Society, Culture & Language*, 5(1), hal. 58 – 67.
- Owens, Jr. R.E. 1992. *Language Development An Introduction*. New York: macmillan Publishing Company.
- Patria, N. & A. Arief. 2015. *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 1992.
- Piller, I. 2016. Monolingual Way of Seeing Multilingualism. *Journal of Multicultural Discourses*, 11 (11), hal 25 – 33.
- Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumarsono. 2010. *Buku Ajar Pragmatik*. Singaraja: Unit Penerbitan Undiksha.
- Surpha, I. W. 2006. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Bali: Pustaka Bali Post
- Thomas, L. & Shan Wareing. 2007. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wang, Zhenping. 2009. Raising and Lowering Speaker's or Hearer's Position in the Politeness Principle in Intercultural Communication. *Intercultural Communication Studies* XVIII (1), hal. 286 – 291.
- Wijana, D.P. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.